

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam *rahmatan lil alamin*, memiliki konsep dan sejarah bagaimana seharusnya sebuah negara dalam melaksanakan pembangunannya, terutama dalam aspek pengelolaan ekonominya. Sebagai agama sempurna, ekonomi dalam Islam adalah *inheren* dalam kesempurnaannya tersebut. Tujuan ekonomi Islam adalah membawa kepada konsep *al-falah* (kesejahteraan) di dunia dan akhirat. Hal ini tentunya berbeda dengan ideologi kapitalistik yang berorientasi pada kehidupan dunia saja.¹

Praktek pengelolaan ekonomi Islam sesungguhnya telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun pengelolaan modern melalui pembentukan departemen tersendiri baru terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab yakni dengan membuat Baitul Māl yang permanent. Sehingga Baitul Māl atau lembaga keuangan menjadi sejarah yang pernah di miliki umat Islam, dan terbukti mampu menjadi alat stabilitas dan kemajuan pemerintahan Islam saat itu.

Sebelum Islam datang kehidupan masyarakat sangat buruk dari segi masyarakat, pemerintahan, institusi karena mereka selalu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Para bankir Yahudi mulai mewarnai kehidupan umat Islam dengan cengkaman ribawi. Jauh dari nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan,

¹ P3I, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

persamaan, kebebasan, dan keadilan. Banyak contoh yang diajarkan dalam masalah ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan hingga menjelang wafatnya Rasulullah Saw, yang dapat dijadikan acuan atau paling tidak sebagai perbandingan bagaimana Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan ummatnya tidak saja di akhirat tapi juga di dunia. Hal yang diajarkan dalam Islam yakni usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syari'ah Islam.²

Sistem ekonomi yang di terapkan oleh Rasulullah Saw. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al- Quran yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam tertinggi adalah hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai Khalifahnya di muka bumi ini.

Rasulullah adalah Kepala Negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara abad ketujuh, karena beliau merupakan teladan yang paling baik dalam implementasi Islam.³ Yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan

² Ibid., 97.

³Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 1.101.

harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Māl yang di masa Nabi Muhammad terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan di masa Rasulullah Saw. tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini terdiri dari:

- a. *Kharāj*, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini di tentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik besarnya pajak ini di tentukan tiga hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah, dan jenis irigasi;
- b. *Zakat*, pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian;
- c. *Khums*, yaitu pajak proporsional sebesar 20%.⁴
- d. *Jizyah*, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan negara Islam;
- e. Penerimaan lainnya seperti *kafarah* dan harta waris dari orang yang menjadi ahli waris.⁵

Pada masa Rasulullah Saw, dana Baitul Māl dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu

⁴Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Satu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: Karim Bussines Consulting, 2001), 97.

⁵Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 94.

pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Seluruh alokasi dana Baitul Māl tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran Islam ini juga akan dapat meningkatkan Baitul Māl.

Pada masa Rasulullah, catatan pengeluaran secara rinci belum ada. Namun demikian, tidak bisa di ambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang tidak dijalankan semestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan di serahkan kepada pengepul zakat dan setiap orang umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang telah ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah Saw. Ia juga menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengepul zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya.⁶

Rasulullah Saw dalam memimpin pemerintahan berperan sebagai eksekutif, yudikatif, dan sekaligus legislatif. Segala kebijakan berpegang teguh pada wahyu Allah. Namun Rasulullah tidak segan-segan bertanya mengenai masalah-masalah tertentu kepada sahabat-sahabat Rasulullah Saw. Allah memerintahkan Rasulnya untuk bertukar pikiran dengan orang-orang beriman dalam urusan mereka, kalau semua diputuskan oleh Allah, maka tidak ada gunanya beliau bertukar pikiran.⁷

⁶ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 79.

⁷ *Ibid.*, 78.

Rasulullah meninggal pada hari senin, 12 Rabiul Awwal atau 8 juni 632 M. Beliau pulang ke Rahmatullah dalam usia 63 tahun 3 bulan. Ini terjadi ketika beliau menyampaikan risalahnya, menunaikan amanat, memberikan keteladanan yang baik, menegakkan keadilan dan mengisi seluruh hidupnya dengan akhlaq terpuji.

Setelah wafatnya Rasulullah Saw., pemimpin pemerintahan di pegang oleh Khulafaurrasyidin. Seluruh tampuk kepemimpinan pemerintahan, negara dan keagamaan di serahkan kepada empat sahabat yakni, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah, yang dipimpin Khalifah pertamanya yakni Mu'awiyah, ketika itu tampuk pemerintahan Islam merupakan awal kekuasaan Bani Umayyah. Sejak saat itu pula pemerintahan Islam yang bersifat demokratis seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah Saw dan Khulafaurrasyidin berubah menjadi monarchi. Muawiyah memperoleh kekuasaan melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui jalan musyawarah. Dalam menjalankan kekuasaannya, ia tetap menggunakan istilah Khalifah yang diartikan sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah SWT.⁸

Sejak Bani Umayyah berkuasa, seorang Khalifah tidak harus dari ahli hukum agama (fuqaha). Dinasti ini mulai memisahkan antara pemegang otoritas keagamaan dengan pemegang otoritas politik. Urusan agama diserahkan kepada

⁸Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 42.

para ulama', urusan negara diserahkan kepada para penguasa pada daulah ini, pusat pemerintahan berada di Damaskus, sedangkan pusat aktivitas keagamaan berada di Madinah.⁹

Selama masa pemerintahan ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Kadaan tersebut memicu timbulnya hasrat Khalifah untuk memanfaatkan kekuasaan sarana memperkaya diri dan keluarganya.

Tak ketinggalan ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Māl pun tak luput dari perubahan. Jika pada masa sebelumnya Baitul Māl dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Māl berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Baitul Māl yang merupakan kantor perbendaraan umat seakan milik pribadi para penguasa. Pada masa Bani Umayyah ada dua macam Baitul Māl yakni Baitul Māl umum dan khusus. pendapatan Baitul Māl umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan Baitul Māl khusus di peruntukan bagi para sultan dan keluarganya. Namun, dalam prakteknya tidak jarang ditemukan berbagai penyimpangan penyaluran harta Baitul Māl tersebut. Pengeluaran untuk para sultan, keluarga,

⁹Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 80.

dan para sahabat dekatnya banyak yang diambilkan dari kas Baitul Māl umum, begitu pula halnya dengan pengeluaran hadiah-hadiah untuk para pembesar negara dan berbagai pengeluaran lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan.¹⁰ Dengan demikian telah terjadi disfungsi penggunaan Baitul Māl pada pemerintahan dinasti Umayyah.

Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar Ibn Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Pada masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz inilah yang memberikan pengertian terhadap kesejahteraan rakyat, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz menyaksikan rakyat yang tertindas oleh kekejaman penguasa-penguasa sebelumnya karena tindakan-tindakan Raja untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Umar tidak ragu menindak setiap orang yang melanggar batasan-batasan yang diletakkan oleh agama.

Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz berhasil mengubah Negara yang semula berada dalam zaman kemunduran dan kegelapan menjadi zaman baru yang adil dan makmur. Umar berhasil mengubah keborosan dan kesombongan yang selama ini mereka lakukan sebelum Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz berkuasa, maka dia menuntut mereka masyarakatnya kepada kehidupan yang sederhana.

Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz berusaha melapangkan, meluruskan dan menempatkan aktivitas perekonomian sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran

¹⁰Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung:Pustaka Bandung,1984), 311-312.

Islam. Berbagai macam perekonomian yang menyimpang dari yang seharusnya di kembalikan kepada nilai-nilai keadilan.

Langkah-langkah yang dilakukan Umar Ibn Abdul Aziz dalam memperbaiki pemerintahan adalah memecat pejabat yang zalim, menghentikan peperangan di kalangan Non Islam untuk memperluas Islam dengan cara lemah lembut dan bijak, menghapuskan caci maki terhadap Ali bin Abi Thalib pada waktu khutbah jum'at, mengurangi beban pajak bagi orang Nasrani, mengembalikan tanah atau harta yang dirampas oleh penguasa terdahulu kepada pemiliknya, membuat aturan timbangan dan takaran untuk menghindarkan dari pemaalsuan takaran, dan mengadakan perbaikan tanah-tanah pertanian serta irigasi, penggalian sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan serta memberikan keterampilan dan lapangan kerja yang sesuai dengan ahlinya.¹¹

Pada kasus Baitul Māl Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Māl dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke Baitul Māl. Harta tersebut diperoleh dan warisan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan. Di antara harta itu terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Mekah, yang sejak Nabi Saw wafat dijadikan rmlik negara. Namun, Marwan bin

¹¹ Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 102.

Hakam (Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah 684-685 M) telah memasukkan harta tersebut sebagai milik pribadinya dan mewariskannya kepada anak-anaknya.

Pada masa Umayyah, khususnya Umar bin Abdul Aziz ini, fungsi Baitul Māl terus meluas. Tidak hanya sekedar menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Māl juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹²

Pada masa pemerintahannya sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian (pajak ini di awal pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz ditiadakan mengingat situasi ekonomi yang belum kondusif, setelah stabilitas perekonomian masyarakat membaik, pajak ini diterapkan) hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.

Sejumlah perkembangan baru muncul dari masa ke masa. Munculnya berbagai kebijakan tersebut sebagai akibat timbulnya masalah-masalah baru. Salah satu masalah pada waktu itu, berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga problem teknis untuk mengatasi masalah-masalah

¹²Imadudin Khalil, *Umar Ibn Abdul Aziz: Perombak Wajah Pemerintah Islam* (Solo: Pustaka Mandiri, 1992), 128.

perniagaan (*mu'amalah*) muncul pada waktu itu. Sejumlah aturan ijtihad yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadits hadir menyelesaikan berbagai masalah.

Dari fenomena historis yang sedikit telah di paparkan, Penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji lebih dalam mengenai Baitul Māl pada masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Kajian tentang konteks histories berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang menghasilkan kehidupan ekonomi yang makmur penting dilakukan. untuk menjalankan fungsi Baitul Māl yang semula dan berorientasi membawa kesejahteraan masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah Baitul Māl ?
2. Bagaimana biografi dan kebijakan-kebijakan Umar Ibn Abdul Aziz?
3. Bagaimana kondisi Baitul Māl pada masa Umar Ibn Abdul Aziz?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah Baitul Māl.
2. Untuk mengetahui biografi dan kebijakan-kebijakan Umar Ibn Abdul Aziz.
3. Untuk mengetahui kondisi Baitul Māl pada masa Umar Ibn Abdul Aziz.

D. Kegunaan penelitian

Adapun penelitian terhadap Baitul Māl pada masa Umar Ibn Abdul Aziz tersebut di harapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Untuk memperkaya khazanah kepustakaan sejarah ekonomi Islam klasik agar menjadi bacaan yang berguna bagi masyarakat terutama bagi mereka yang ingin mengetahui Baitul Māl pada Masa Umar Ibn Abdul Aziz
2. Untuk meningkatkan wawasan keilmuan penulis dalam bidang keilmuan guna memenuhi syarat strata 1 di UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Pendekatan Dan Kerangka Teoritik.

Dalam penulisan skripsi tentang “Baitul Māl Pada Masa Umar Ibn Abdul Aziz” penulis menggunakan pendekatan historis yang bertujuan mengetahui atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Melalui pendekatan historis ini diharapkan bisa mengungkapkan mulai dari awal pembentukan Baitul Māl, perkembangan dari masa ke masa sampai segala aktivitas yang dilakukan Rasulullah, Khulafaurrasyidin hingga masa Umar Ibn Abdul Aziz.

Untuk memahami sejarah Baitul Māl penulis mencoba mengadakan penelitian pustaka terhadap buku-buku sejarah Islam klasik. Penulis menggunakan teori Karl Marx tentang Negara. Yang mengakui kepentingan struktur sebagai agen ekonomi. Dominasi ekonomi yang lama oleh kalangan elite akan mengalami kehancuran karena negara atau penguasa secara tidak langsung melakukan intervensi untuk mengatasi krisis ekonomi dengan menciptakan

pekerjaan, merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada rakyat. penelitian sosiologi, kebijakan pada masa lampau, kesehatan dan kesejahteraan adalah topik yang sering dikaji. Penelitian tentang kebijakan yang berhubungan dengan kerja dan keluarga tumbuh dari perhatian teoritis. demikian kebijakan pada Baitul Māl di masa Umar Ibn Abdul Aziz mengalami perubahan.¹³

Pada masa Umar Ibn Abdul Aziz Baitul Māl dapat menghilangkan permusuhan dan perebutan harta hasil rampasan perang, dapat mengendalikan pengeluaran belanja negara, dan dapat pula menghilangkan dominasi kaum feodal dan kaum kaya sehingga terjadi keseimbangan dalam perekonomian rakyat.

F. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terkait Umar Ibn Adul Aziz yang pernah dilakukan antara lain adalah: Pembaharuan Umar Ibn Abdul Aziz Dalam Pemerintahan Bani Umayyah, (Fakultas Adab Jurusan SKI, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1993) skripsi ini ditulis oleh Romlah, pada penelitian tersebut menekankan pada pembaharuan yang di jalankan Umar Ibn Abdul Aziz.

Pernelitian yang kedua yakni, perekonomian umat Islam pada masa Umar Ibn Abdul Aziz (717-720 M), (Fakultas Adab Jurusan SPI IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006) skripsi ini ditulis oleh Zahrotul Aliyah, pada penelitian tersebut banyak menekankan pada peranan pembaharuan tentang perekonomian pada

¹³Tom Cambel, *Tujuh Teori Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1994),134-141.

masa Umar Ibn Abdul Aziz. Sedangkan skripsi yang membahas fokus pada kondisi Baitul Māl masa Umar Ibn Abdul Aziz belum ada.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya. Serta usaha sintesis atas data menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.¹⁴ Adapun langkah langkah dari metode sejarah yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik atau pengumpulan data dari sumbernya, yakni mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi, berupa buku-buku kepustakaan yaitu sumber atau data yang digali dan di peroleh dari buku-buku literatur.¹⁵ adapun sumber yang digunakan oleh penulis adalah sumber skunder meliputi kepustakkaan yang berupa referensi ataupun tulisan – tulisan yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber, yaitu tahap menguji keabsahan sumber-sumber yang di peroleh penulis di uji keabsahannya: apakah sumber-sumber tersebut kredibel atau tidak. Verifikasi yang penulis lakukan adalah dengan cara menguji validitas eksternal, yaitu dengan melakukan perbandingan

¹⁴Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 54.

¹⁵ Ibid., 43-44.

antara suatu sumber dengan sumber yang lain agar dapat diperoleh kredibilitasnya. Misalnya: penulis membandingkan buku dengan buku.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran disebut juga dengan analisis sejarah¹⁶. Analisis berarti menguraikan sebelum data terkumpul dan dibandingkan lalu disimpulkan untuk di tafsirkan. Dalam hal ini penulis menghubungkan data-data yang penulis peroleh dengan tema pokok skripsi, Yaitu "Baitul Māl Pada Masa Umar Ibn Abdul Aziz" penulis kemudian menganalisis sumber-sumber tersebut dengan prespektif teori yang penulis pilih.

4. Histriografi

Metode yang terakhir adalah historiografi yaitu cara penulis, memaparkan atau laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian peneliti menulis dan mencoba menyajikan penelitian tersebut dalam satu karya yang berupa skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini di bagi dalam beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Pada bab ini menggambarkan secara global keseluruhan isi skripsi ini, terdiri atas latar belakang masalah, pendekatan dan kerangka teori, tinjauan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, bahan sumber-sumber dan sistematika penulisan.

¹⁶ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995),100.

Pada bab kedua tentang Baitul Māl. Pada bab ini berisikan pengertian Baitul Māl, sejarah pembentukan Baitul Māl, dan kondisi Baitul Māl sebelum masa Umar Ibn Abdul Aziz.

Selanjutnya pada bab ketiga tentang ini berisikan tentang Umar Ibn Abdul Aziz dan kebijakannya, pada bab ini berisikan biografi Umar Ibn Abdul Aziz, kebijakan politik dan ekonomi Umar Ibn Abdul Aziz.

Pada bab keempat membahas tentang Baitul Māl pada masa Umar Ibn Abdul Aziz. Pada bab ini berisi berisikan tentang Baitul Māl dalam peradaban Islam.

Sebagai akhir bahasan kami beri penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.